PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Radar Hari: Kamis Tanggal: 05 Juni 2014 Halaman: 1

Tahun Ketiga Kepemimpinan Haryadi Suyuti-Imam Priyono

Orientasi Pembangunan Berbasis Kewilayahan

RADAR JOGJA FILE

Selama ini konsep membangun Jogja itu lebih kepada orientasi magnet pembangunan. Maka pada saat HS-IP langkah pertama yang dilakukan cenderung kepada konsep pembangunan kewilayahan lebih kepada pemerataan."

AMAN YURIADIJAYA, Asisten Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Jogja

Tepat 7 Juni 2014 Pemerintah Kota Jogja memasuki tahun ketiga di bawah kepemimpinan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) dan Wakil Wali Kota Jogja Imam Priyono (IP). Sejumlah strategi pembangunan diterapkan untuk membangun Kota Jogja lebih baik lagi.

SALAH satu konsep yang dilakukan dengan pembangunan berbasis kewilayahan.

Asisten Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Jogja Aman Yuriadijaya mengatakan, genap berusia ke-67 tahun pemkot terus berbenah diri melakukan pembangunan berbasis kewilayahan. Itu berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jogja. Kepemimpinan HS-IP menerapkan strategi yang berbeda dalam membangun Kota Jogja. "Selama ini konsep membangun Jogja itu lebih kepada orientasi magnet pembangunan. Maka pada saat HS-IP langkah pertama yang dilakukan cenderung kepada konsep pembangunan kewilayahan lebih kepada pemerataan," tegas Aman Yuriadijaya di Balai Kota kemarin (4/6).

Strategi kedua dengan mendorong serta meningkatkan jaring pengaman sosial ■

▸ Baca Orientasi... Hal 11

■ ORIENTASI...

Sambungan dari hal 1

Fokusnya lebih kepada kepentingan di bidang pendidikan dan kesehatan pada tahun pertama dan tahun kedua. Kedua bidang tersebut telah menjadi orientasi utama dari seluruh pelayanan yang dilakukan pemkot dari sisi politik anggaran dan sisi kebijakan pemerintah kota.

Kedua strategi tersebut menyangkut orientasi kewilayahan meski program yang telah dilaksanakan tersebut baru kelihatan empat tahun ke depan. "Memang aspek kewilayahan dan pemerataan baru terlihat empat tahun ke depan. Saat program ini dijalankan itulah poin dari pembangunan kewilayahan," tuturnya.

Langkah mendorong program kewilayahan dengan mengedepankan perubahan kebijakan internal dalam bentuk pelimpahan kewenangan mulai dari tingkat kelurahan hingga di kecamatan.

Karena dengan pelimpahan kewenangan mampu membangun secara detail sebuah informasi pembangunan. Selain itu juga dapat menangkap aspirasi masyarakat dengan cepat langsung mendelegasikan pelimpahan kewenangan di wilayah.

Proses koneksi informasi dan aspirasi tersebut menjadi awal menuyusun rencana aksi dalam pelimpahan kewenangan di wilayah Kota Jogja. Dalam pembangunan kewilayahan sebagai upaya dari pagu anggaran yang jelas pada basis kewilayahan. Dengan mengedepankan variabel jumlah penduduk, unsur luas wilayah dan aspek kompleksitas persoalan yang ada di wilayah.

Secara proposional pemkot terus mendorong pagu anggaran tidak hanya pada aspek fisik melainkan didorong pada kewilayahan yakni eknonomi dan sosial. Sesuai porsi 40 persen fisik, 30 persen ekonomi dan 30 persen sosial yang menjadi hal baru dalam pelimpahan kewenangan.

"Tentu semua unsur itu harus dibumbui atau diberikan warna tentang semangat kontruksi sosial di masyarakat sebagai bentuk implementasi Segoro Amarto," tegasnya.

Beberapa aspek tersebut harus mampu memunculkan nuansa konstruktif Segoro Amarto sudah sejauh mana mampu mencerminkan kedisiplinan dan kepedulian yang terlihat di masyarakat. Hal tersebut nantinya akan memunculkan kemandirian atas kebersamaan dan kemufakatan dalam bentuk kepedulian.

Strategi tersebut pada dua tahun terakhir pemerintahan HS-IP terlihat dari perbaikan fasilitas intraksi sosial masyarakat. Seperti Balai RW, infastruktur limbah, penerangan jalan umum (PJU), Kantor Kelurahan dan Kecamatan termasuk fasilitas berkaitan dengan permukiman atau rumah layak huni.

"Pemkot telah melakukan sesuatu di bidang pembangunan fisik di dua tahun terakhir ini meski fenomena gejalanya baru terlihat total pada empat atau lima tahun hasilnya untuk kewilayahan,"paparnya.

Sementara pemkot pada tahun anggaran 2014 berupaya meningkatkan kualitas program penanggulangan kemiskinan. Dengan disesuaikan akar permasalahan penduduk miskin yang ada di masing-masing wilayah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jogja Edy Muhammad mengatakan, program penanggulangan kemiskinan akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran.

Berdasarkan RPJMD Kota Jogja angka kemiskinan di Kota Jogja ditargetkan sebesar 8, 4 persen dari total penduduk pada 2016. Jika dilihat dari angka kemiskinan Kota Jogja berdasarkan penerima kartu menuju sejahtera (KMS) terlihat penurunan dalam dua tahun terakhir.

Tahun 2012 warga pemegang KMS di Kota Jogja sebesar 68.1888 jiwa dibanding tahun 2013 hanya 64.699 jiwa.

Adanya pelimpahan kewenangan kewilayahan di kelurahan dan kecamatan mampu menanggulangi kemiskinan hingga tingkat wilayah. Wilayah juga memperoleh pagu anggaran sebesar 30 persen untuk peningkatan kegiatan ekonomi. Serta 30 persen untuk kegiatan sosial bduaya dan 40 persen untuk kegiatan fisik.

"Wilayah juga tidak hanya fokus pada kegiatan fisik saja. Tetapi melakukan berbagai kegiatan ekonomi dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pelatihan dan keterampilan yang diberikan kepada warga," jelasnya. **(hrp/din/gp)**

Lanjut
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

anggapi
ketahui
ars
.....
M
005

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005